

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun hingga saat ini penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih \pm 220 juta jiwa sampai angka ini muncul, angka kelahiran (*fertilitas*) penduduk Indonesia masih terus meningkat. Angka yang meningkat ini harus diimbangi dengan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang tinggi. Disamping itu sudah sejak dahulu bangsa-bangsa di dunia mengakui bahwa Indonesia sangat kaya dalam hal sumber daya alam, namun apa yang terjadi saat ini kekayaan alam yang berlimpah dan kita banggakan itu masih belum dapat digali dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Kenyataan tersebut masih erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia negara kita yang masih sangat rendah.

Kondisi empirik rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dipertegas oleh laporan yang dikemukakan oleh United Nations Development Project (UNDP) pada tahun 2000 sebagai badan PBB yang menangani program pembangunan, bahwa tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia ternyata berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara yang diteliti di dunia. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand, masing-masing menempati peringkat ke-41 sampai ke-44, posisi negara kita bahkan dibawah Vietnam yang baru bangkit dari tekanan

Amerika Serikat, prestasi sumber daya manusia Indonesia telah jauh tertinggal. Apalagi jika dibandingkan dengan negara Jepang dan negara Korea yang berturut-turut menempati posisi ke-8 dan ke-30.

Kenyataan tersebut sangatlah memprihatinkan, belum lagi multi krisis yang dialami bangsa ini sejak pasca runtuhnya pemerintahan orde baru hingga saat ini masih belum kunjung tuntas yang sudah hampir menumpulkan semua sendi-sendi perekonomian bangsa, dan berimbas sangat negatif terhadap pendidikan di negara kita. Multi krisis yang kita alami sangat memungkinkan biaya penyelenggaraan pendidikan sangat mahal, sedangkan pendapatan masyarakat tergolong masih rendah. Sehingga memungkinkan pula banyak para siswa putus sekolah, atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kondisi tersebut didukung data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, angka putus sekolah pada tahun 2001 menunjukkan pada jenjang pendidikan SD sebanyak 18.840 orang, SLTP sebanyak 9.914 orang dan SMU sebanyak 2.992 orang.

Maju mundurnya suatu bangsa antara lain bergantung pada kualitas sumber daya manusia, dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pendidikannya. Bukti-bukti diatas menyatakan bahwa mutu pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia diatur dalam suatu sistem pendidikan nasional, dan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yang menegaskan sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3, 2003 : 7)

Pendidikan Nasional diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional berupaya menjadi tatanan penyelenggaraan pendidikan nasional agar seluruh warga negara memiliki pengetahuan, keterampilan sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan bagi perannya dimasa yang akan datang, oleh sebab itu pendidikan menjadi salah satu sarana yang sangat penting dalam menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mandiri, maju dan berpikiran modern atas dasar pancasila, sehingga dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain di dunia.

Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan melalui undang-undang nomor 20 tahun 2003 bab VI pasal 13 tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwa : “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003 : 10).

Pendidikan nasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan keluarga. Jalur pendidikan ini diharapkan sistem pendidikan nasional semakin mantap dalam meletakkan dasar penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan nasional, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau

pelengkap pendidikan sekolah dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan dalam setiap garis-garis besar haluan negara merupakan prioritas utama sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berbagai inovasi dan program pendidikan terus dilaksanakan melalui penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar dan buku referensi lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (1999 : 20) dikemukakan sebagai berikut :

Pembangunan di bidang pendidikan dilakukan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Kualitas pendidikan nasional terus ditingkatkan kualitasnya agar terwujud sumber daya manusia yang dapat berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Namun kini muncul berbagai indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum meningkat secara signifikan. Dari dalam negeri diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia relatif rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dari kalangan dunia usaha dan industri muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia menurut Biro Statistik dalam Sukernas 1997 dan 1998 BPS Jakarta, Indonesia pada Indikator Tingkat Hidup Pekerja 1997-1998, (1996 : 6) menyatakan sebagai berikut : “bahwa tingkat pendidikan pekerja Indonesia pada umumnya masih rendah”. Keadaan tersebut terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 63,5 % dari mereka hanya berpendidikan sampai dengan sekolah dasar atau putus sekolah dasar.

Pendidikan di Indonesia pada era globalisasi sekarang ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia ekonomi dituntut agar mampu mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sehingga mampu bersaing dalam pasar global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Seorang pakar pendidikan luar sekolah, Ivan Illich (1972) dalam Djudju Sudjana (2000 : 83-84) menggambarkan bahwa sekolah memonopoli pendidikan dan lebih menitik beratkan produk lulusan yang hanya didasarkan atas hasil penilaian dengan menggunakan angka-angka dan ijazah. Sekolah telah mengaburkan makna belajar dan mengajar, jenjang pendidikan dan tingkat kemampuan, pemilikan ijazah dan kemampuan lulusan untuk berprestasi dan berinovasi. Proses pendidikan didominasi oleh guru yang cenderung merampas

harga diri peserta didik.. Proses yang demikian pada dasarnya mengakibatkan lemahnya ketahanan pribadi peserta didik, kurangnya sikap kreatif, dan rasa ketidakbebasan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Ivan Illich menyarankan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tersebut perlu mengadakan revolusi belajar secara menyeluruh dalam sistem pendidikan yang ada sekarang dengan menyelenggarakan jaringan-jaringan belajar (*learning webs*) di masyarakat. Program jaringan belajar ini mencakup pertukaran keterampilan dan keahlian, dan mempertemukan peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar dengan sumber belajar yang tepat untuk melayaninya. Salah satu program pendidikan luar sekolah yang saat ini sedang dikembangkan adalah pendidikan kecakapan hidup (*life skills*).

Berpijak dari masalah di atas, kiranya perlu dilakukan konsolidasi, agar pendidikan dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Artinya peserta didik yang telah mengikuti pendidikan kecakapan hidup memiliki keterampilan tertentu yang dapat digunakan sebagai keahlian untuk meningkatkan pendapatan ekonomi kehidupannya sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Dengan

bekal kecakapan hidup tersebut diharapkan para lulusan akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan.

Menjawab tantangan di atas, departemen pendidikan nasional telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya mengatasi masalah-masalah pendidikan antara lain dengan mengusahakan perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (*school based management*) dan masyarakat (*community based management*), sejalan dengan era desentralisasi pendidikan. Khusus berkenaan dengan kualitas dan relevansi, disamping mengembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis kompetensi, juga mengarahkan sistem pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang “pendidikan pada kecakapan hidup” melalui pendekatan “*Broad-Based Education*” atau pendidikan berbasis kepada kebutuhan masyarakat luas.

Pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak semua anak usia pendidikan dasar masuk sekolah dan atau dapat menyelesaikan pendidikannya (putus sekolah). Pada tahun 2000 tercatat sekitar 6 juta anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas masih tercatat sekitar 5,9 juta orang. Dalam pada itu Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi hanya sebesar 11,6%, berarti 80% dari anak usia 19-24 tahun berada di luar sistem persekolahan dan kelompok inilah yang sebagian harus dilayani melalui jalur pendidikan luar sekolah. Di samping itu, struktur tenaga kerja Indonesia 63,5% hanya berpendidikan SD ke



jumlah penduduk miskin tercatat 37,5 juta orang (SUSENA 2000) dan setiap tahun menjadi penambahan angka angkatan kerja baru lebih dari 2 juta orang dan yang terserap di lapangan kerja, baik sektor formal maupun informal rata-rata hanya sekitar 20% (Depdiknas, 2002 : 2). Rendahnya daya serap tersebut bukan semata-mata karena sempitnya lapangan kerja akan tetapi kompetensi atau keterampilan yang diinginkan oleh lembaga penerima kerja tidak terpenuhi oleh sebagian besar pencari kerja.

Pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk membekali seseorang pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Pendidikan kecakapan hidup dirancang untuk membimbing, melatih, dan membelajarkan warga belajar agar memiliki bekal dalam menghadapi masa depannya dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.

Persyaratan dasar jenis pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) jalur pendidikan luar sekolah menurut Ditjen PLSP (2002:6) adalah sebagai berikut

1. Kecakapan hidup dikembangkan berdasarkan minat dan bakat kelompok sasaran.
2. Terkait dengan karakteristik potensi wilayah setempat misalnya sumber daya alam, ekonomi, pariwisata, dan social budaya.
3. Dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha kecil atau industri rumah (*home industri*), pelatihan berorientasi pada peningkatan kompetensi keterampilan untuk berusaha dan bekerja.
4. Lebih bersifat aplikatif, dan operasional.
5. Jenis kecakapan ditetapkan oleh program bersama-sama dengan warga belajar, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat, dan lainnya yang berhubungan dengan program kecakapan hidup.

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) melalui jalur pendidikan luar sekolah diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan kerja yang mencakup : pemilihan kerja, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, pemilikan suatu profesi, kesadaran proses pekerjaan, dan keterampilan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dipasarkan.

Terwujudnya pendidikan kecakapan hidup, maka perlu diterapkan prinsip pendidikan berbasis luas (*broad based education*) yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik semata atau vokasional semata, tetapi juga memberikan bekal *learning how to learn* sekaligus *learning to unlearn*, tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktekkannya untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik agar :

- (1) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja secara mandiri (*wirausaha*) dan atau bekerja pada suatu perusahaan produksi jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global, (3) memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya, (4) memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat.



Maksud pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat dan warga negara. Jika hal itu berhasil, maka faktor ketergantungan (*dependency factor*) akibat banyaknya pengangguran dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat. Sebagai suatu konsep pendidikan kecakapan hidup tentu terbuka dan memang akan terus berkembang.

Berpijak pada kondisi yang telah dikemukakan di atas maka, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelatihan kecakapan hidup montir elektronika yang bertujuan untuk membekali pengetahuan, sikap dan keterampilan warga belajar (pemuda putus sekolah) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya di bidang ekonomi. Pelatihan kecakapan hidup montir elektronika di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya selain di dukung oleh berbagai program pelayanan pendidikan luar sekolah di dalamnya menggunakan pendekatan belajar tuntas dengan pengendalian dan pembinaan yang sistematis.

Pelatihan kecakapan hidup bagi pemuda putus sekolah di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasikmalaya merupakan upaya pemecahan masalah, karena yang menjadi peserta didik adalah mayoritas pemuda putus sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau penyandang masalah sosial, sehingga perlu penanganan khusus. Adapun pelayanan yang diberikan yaitu berupa pelatihan kecakapan hidup seperti keterampilan montir elektronika, montir otomotif, mekanik las, instalatur listrik dan keterampilan handicraft. Disamping itu mereka juga



mendapatkan bimbingan fisik, mental, sosial sewaktu mengikuti pelatihan selama lima bulan. Pelatihan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terbagi menjadi empat bidang keterampilan dan warga belajar yang berasal dari sekitar Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.

Hasil observasi menunjukkan bahwa model pelatihan kecakapan hidup montir elektronika yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya ini perlu dikaji dan diteliti keberadaannya sebagai salah satu model pendidikan luar sekolah yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan permasalahan pada perencanaan program, pelaksanaan program, hasil dan pengaruh program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Identifikasi Masalah

Balai Latihan Kerja (BLK) salah satu pusat kegiatan pelatihan masyarakat yang menyelenggarakan pelatihan kecakapan hidup montir elektronika yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta tuntutan kemandirian bagi lulusannya untuk memasuki dunia kerja.

Penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup montir elektronika di BLK Kabupaten Tasikmalaya bertujuan : (1) memberi bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kemandirian serta jiwa kewirausahaan warga belajar untuk memasuki dunia kerja, atau berusaha mandiri untuk membuka lapangan kerja, (2) memberi bekal pengetahuan dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan

akhirnya memberi dampak meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga belajar secara ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yakni :

(1) Rekrutmen peserta pelatihan yang dilakukan BLK Kabupaten Tasikmalaya, (2) Sasaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan BLK Kabupaten Tasikmalaya, (3) Standar kompetensi pelatihan yang ditetapkan BLK Kabupaten Tasikmalaya. (4) Pendekatan, materi, metode dan teknik pelatihan yang ditetapkan di BLK Kabupaten Tasikmalaya, (5) Perencanaan program pelatihan yang dilaksanakan di BLK Kabupaten Tasikmalaya, (6) Proses pelaksanaan program pelatihan yang dilakukan di BLK Kabupaten Tasikmalaya, (7) Evaluasi program pelatihan yang dilakukan di BLK Kabupaten Tasikmalaya, (8) Hasil program pelatihan yang dilaksanakan di BLK Kabupaten Tasikmalaya, (9) Dampak atau pengaruh program pelatihan yang dilaksanakan di BLK Kabupaten Tasikmalaya terhadap lulusannya.

C. Perumusan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar dan pembatasan masalah menjadi jelas pada penelitian ini penulis merumuskan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelatihan kecakapan hidup (*life skills*) montir elektronika dalam pengembangan kemandirian pemuda putus sekolah di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya”.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana hasil dan pengaruh program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya terhadap lulusannya ?

D. Definisi Operasional

1. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian tertentu atau pengetahuan tertentu (Henry Simamora, 1995 : 287). Sedangkan yang dimaksud pelatihan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, sikap dan keterampilan warga belajar (pemuda putus sekolah dalam bidang montir elektronika)
2. Kecakapan hidup (*life skills*) menurut WHO adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara efektif.

Sedangkan pelatihan kecakapan hidup montir elektronika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri melalui usaha merakit dan memperbaiki barang-barang elektronika.

3. Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Djudju Sudjana, 2000 : 61) sedangkan perencanaan program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika dalam penelitian ini adalah : identifikasi kebutuhan pelatihan, rekrutmen peserta pelatihan, perumusan tujuan pelatihan dan penyusunan program pelatihan.

Pelaksanaan adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan terutama proses pembelajaran dalam pelatihan, sedangkan yang dimaksud pelaksanaan pelatihan dalam penelitian ini adalah proses pelatihan yang diberikan pada warga belajar meliputi : materi, pendekatan, metode, teknik, media, sarana dan evaluasi pembelajaran.

Evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendeskripsikan dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk mengambil keputusan. (Djudju Sudjana, 2000 : 267). Sedangkan yang dimaksud evaluasi dalam penelitian ini adalah evaluasi hasil dan pengaruh program pelatihan.

4. Hasil menurut kamus besar bahasa indonesia (1996 : 343) hasil artinya sesuatu yang diperoleh dari suatu usaha, sedangkan yang dimaksud hasil dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau perubahan pengetahuan dan keterampilan di bidang montir elektronika serta sikap kemandirian dan jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usaha di bidang elektronika bagi warga belajar yang telah selesai mengikuti pelatihan di BLK Kabupaten Tasikmalaya.



5. Dampak atau pengaruh adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996 : 207).
Sedangkan dampak atau pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh positif hasil pelatihan kecakapan hidup montir elektronika terhadap peningkatan kemandirian serta perubahan taraf hidup lulusan yang ditandai dengan perolehan pekerjaan atau berwiraswasta, peningkatan pendapatan, kesehatan dan penampilan diri, membelajarkan orang lain dan peningkatan partisipasinya dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.
6. Kemandirian adalah perilaku yang aktifitasnya diarahkan pada diri sendiri dan tidak meminta bantuan pada orang lain dengan ciri-ciri : tanggung jawab, tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin dan berani mengambil resiko, memiliki keterampilan tertentu untuk dijadikan mata pencaharian, memiliki penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya, memiliki keterampilan kewirausahaan (Bathia 1977 dalam Rifaid 2000).
Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan kemandirian dalam penelitian ini adalah suatu proses peningkatan kualitas perilaku seseorang untuk mandiri dalam bekerja dan usaha, khususnya dalam bidang montir elektronika.
7. Pemuda yaitu berdasarkan SK Mendikbud No 0323/1978 tanggal 28 Oktober 1978 tentang pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda, disebutkan bahwa pengertian pemuda berdasarkan umur dan lembaga serta ruang lingkup tempat pemuda berada, dapat dibagi ke dalam tiga kategori :

(1) Siswa usia 6 – 18 tahun yang masih berada di bangku sekolah, (2) Mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi usia 18 – 25 tahun, (3) Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi usia antara 15 – 30 tahun.

Putus sekolah adalah seseorang yang telah terdaftar pada suatu sekolah atau perguruan tinggi dan bercita-cita untuk menamatkannya akan tetapi karena sesuatu hal keluar dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut sebelum tamat atau lulus. (Baharuddin M, 1982 : 247.). Sedangkan yang dimaksud pemuda putus sekolah pada penelitian ini adalah para pemuda tamatan SLTP yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan para pemuda putus sekolah SLTA serta para tamatan SLTA yang tidak dapat melanjutkan kuliah dan para pemuda putus kuliah dengan usia 16 – 30 tahun.

8. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan pendidikannya pada pendidikan luar sekolah guna memberikan keterampilan pada mereka yang tidak memiliki keterampilan formal agar mereka dapat berdaya guna dan mandiri di masyarakat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang perencanaan program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika pada BLK Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika pada BLK Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk memperoleh gambaran tentang hasil dan pengaruh program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika pada BLK Kabupaten Tasikmalaya terhadap lulusannya.

F. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam terhadap perencanaan program, pelaksanaan program, hasil dan pengaruh program pelatihan kecakapan hidup montir elektronika dalam pengembangan kemandirian pemuda putus sekolah di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil temuan dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan teori terhadap pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS) dan juga dijadikan kajian teoritis lebih lanjut bagi perumusan dan pengembangan pelatihan kecakapan hidup dalam memberikan pelayanan pelatihan bagi masyarakat.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai kegiatan pelatihan kecakapan hidup montir elektronika yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau rambu-rambu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas hasil pelatihan kecakapan hidup montir elektronika bagi pemuda putus sekolah yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja di Kabupaten Tasikmalaya.

G. Kerangka Pemikiran

Arah pendidikan luar sekolah harus lebih ditekankan pada bimbingan, dan pelatihan yang berorientasi pada kemandirian berkarya dan berusaha. Karena konsep-konsep pekerjaan pada masa depan akan lebih dinamis, maka bentuk pelatihan "*Short Courses*" akan menjadi sangat relevan diselenggarakan (Tilaar H.A.R, 1998 : 137). Menurut *Jacgues Delors* (1999 : 70) dalam laporannya kepada UNESCO dari komisi internasional tentang untuk abad 21, bahwa pendidikan sepanjang hayat harus didasarkan sendi belajar, yaitu belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup dan belajar menjadi seseorang.

Sejalan dengan hal itu pendidikan luar sekolah sebagai salah satu program pendidikan nasional yang lebih kosen dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan bimbingan dan pelatihan yang memberikan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan praktis kepada warga belajar sebagai upaya memandirikan mereka agar dapat bekerja dan berusaha ditengah-tengah masyarakat yang semakin global dan maju.

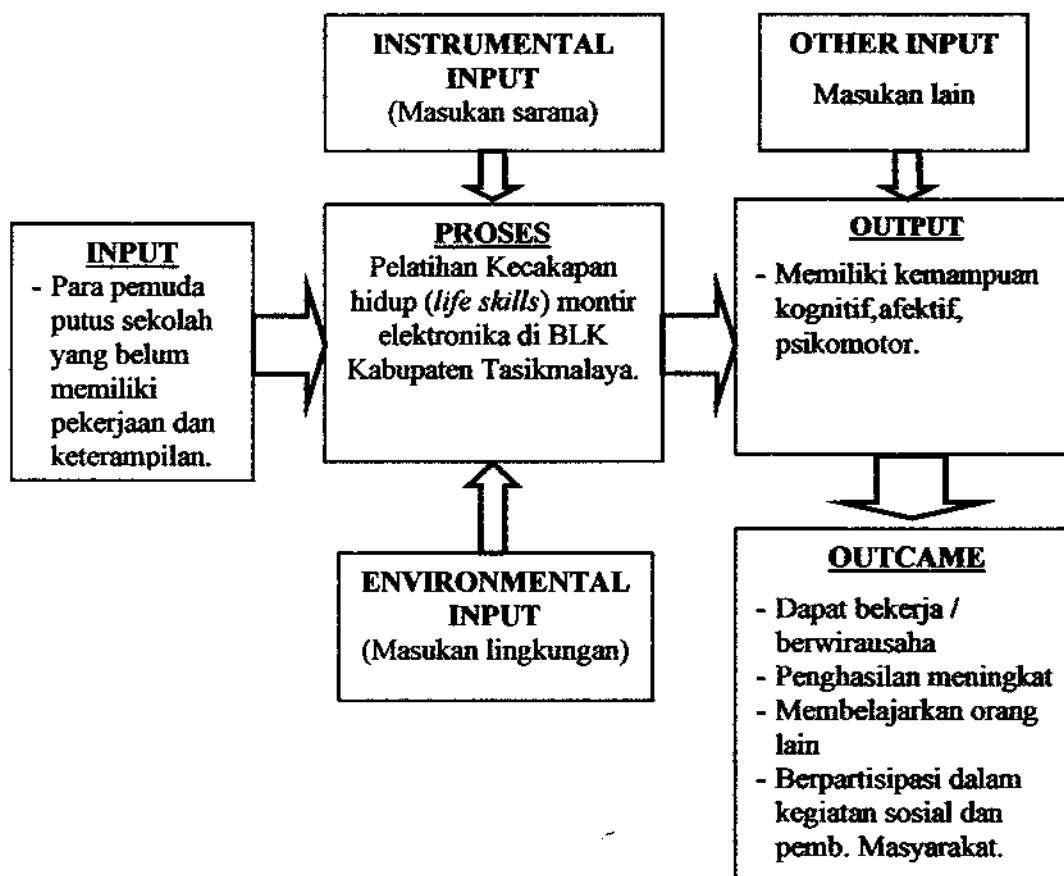
Sasaran program pendidikan luar sekolah adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat dan yang sudah pernah memperoleh pendidikan formal meliputi : (1) penduduk yang masih buta aksara latin, angka dan bahasa Indonesia, (2) warga belajar yang belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, c) warga belajar yang *drop out* (putus sekolah) dan warga belajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (Program Pembelajaran Nasional Bab VII, 2002 – 2004 : 173).



Salah satu bentuk nyata dari program pendidikan luar sekolah adalah dengan diselenggarakannya suatu pelatihan kecakapan hidup montir elektronika oleh lembaga pelatihan keterampilan yang dalam penelitian ini diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai perwujudan nyata dari pemberdayaan masyarakat yang belum memiliki keahlian yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang mandiri yang dapat bekerja dan berusaha di masyarakat.

Pelatihan kecakapan hidup tersebut merupakan satuan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) karena melalui kegiatan ini diharapkan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan serta perluasan wawasan berpikir dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup produktif dan mandiri tidak tergantung pada orang lain dan dapat berperan serta dalam pembangunan serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan layak ditengah-tengah masyarakat dan bangsanya.

Apabila kerangka pemikiran tersebut dituangkan kedalam bentuk gambar dapat dibentuk sebagai berikut :



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Proses Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skills) Montir Elektronika.

Sumber : Djudju Sudjana, 2001 : 34 (Diilustrasikan penulis)



